

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Abdul Wahid dan M.Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Press Cipta, Malang, 2006.
- Ahmad M.Ramli, *e-Logistics Contract Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Malfunction, Keamanan Siber, dan Data Pribadi*, Bandung, 2017.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Armico, 1987.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1998.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

- Didik M. Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2005.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Endah Dewi, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Cyber Law terkait data privasi dan beschikking digitalisasi*, PT Alumni Bandung, 2016.
- Eros Djarot dan Robert Haas, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Jakarta, Yayasan Obor, Indonesia, 1998,
- E.Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- E.Y. K. Santer dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 1998.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1988.
- Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia*, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiarjo, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pusata Utama, 2003.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cet. Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- Nimatul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, 1986.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta, 2007.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1991, 111. *Indonesia 1945-2025*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Shinta Dewi, *Cyberlaw “Perlindungan Privasi atas informasi pribadi dalam e-commerce menurut hukum internasional*, Bandung, 2015.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafino Persada, Jakarta, 2011.
- St. Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia- Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, UAJ, 1993.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2003.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, PT Refika Aditama, 2015.

JURNAL

Abdul Agis, Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Al Hikam Universitas Muslim Indonesia Makassar*, Vol. 1 Nomor 2, 2017.

Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, *Jurnal Hukum Universitas Pancasakti*, Edisi 90, September-Desember 2014.

Agus Santoso dan Dyah Pratiwi, Tanggungjawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 Nomor 4, Desember 2018.

Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan*, No 2 Vol 18 – 2016.

Lukmanul Hakim, Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha*, Vol. 10 Nomor 1 , 2018.

Setia Putra, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui E-Commerce, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 4 Nomor 2 Februari-Juli, 2014.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Putusan Mahkamah Agung No 771 K/Pid/2009

WEBSITE

Redaksi Kompas, diakses tanggal 9 Januari 2020, <https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-2019-presiden-jokowi>

Redaksi Cyberlaw, diakses tanggal 25 Desember 2019, <http://cyberlaw.id/tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik/>.

Redaksi Hukum Online, diakses tanggal 1 Juni 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22633/sistem-elektronik-gunakanprinsip-praduga-bersalah/>.

Redaksi Info Hukum, diakses tanggal 21 Desember 2019, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>.

Website Setkab, diakses tanggal 1 Juni 2020, <https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/>.

Wikipedia, diakses tanggal 10 April 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_maya.

Website Kominfo, diakses tanggal 15 Juni 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/> .

Website Kemenkumham, diakses tanggal 15 Juni 2020, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/m/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html>.

LAIN-LAIN

Bagir Manan, Perjalanan Historis Penegakan Hak Asasi Manusia: 50 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Aktualisasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia, (Makalah dalam Diskusi Panel Menyongsong Abad 21 Sebagai Abad Hak Asasi Manusia), Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 12 Desember 1998.

Bagir Manan, Sistim Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian, FH. UII. Press, Yogyakarta, 2005.

Lawrence Lessig, Code Version 2.0 Basic Book Publications, United States, 2006.
Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord, *Law for E-Commerce*, 2007.

Teguh Afriyadi. Analisis Hukum, Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.